

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP TAX AVOIDANCE**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks SRI KEHATI Periode 2013
– 2015)**

***THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE AND FIRM SIZE TO TAX
AVOIDANCE (Empirical Study on Companies Listed in SRI KEHATI Index In 2013-
2015)***

Aliftia Zulfika Putri¹, Muhammad Rafki Nazar², Kurnia³

^{1,2,3}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹aliftiazulfika@student.telkomuniversity.ac.id, ²mohamadrafkinazar@telkomuniversity.ac.id,

³kurnia@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Tax Avoidance merupakan upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak guna mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks SRI KEHATI periode 2013-2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan diperoleh 20 (dua puluh) perusahaan yang terdaftar di Indeks SRI KEHATI dengan kurun waktu tiga tahun sehingga diperoleh 60 (enam puluh) data sampel. Metode analisa yang digunakan adalah regresi data panel.

Hasil penelitian ini adalah bahwa kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan *tax avoidance* sebesar 36.09% sedangkan sisanya sebesar 63.90% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Secara simultan, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional, kualitas audit, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: Kepemilikan Instusional, Komite Audit, Kualitas Audit, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan

Abstract

Tax Avoidance is an effort made by the Taxpayer to reduce the tax burden by not violating tax laws. This study aims to determine the effect of simultaneous and partial corporate governance and firm size to tax avoidance. The population used in this study is a company registered in the SRI KEHATI Index period 2013-2015. The sampling technique used is purposive sampling and obtained 20 (twenty) companies listed in SRI KEHATI Index with a period of three years so that the processed 60 (sixty) sample data. The analysis method used is panel data regression.

The result of this research is that institutional ownership, proportion of independent board of commissioner, audit committee, audit quality, and company size able to explain tax avoidance equal to 36.09% while the rest equal to 63.90% explained by other variable outside of research. Simultaneously, institutional ownership, the proportion of independent board of commissioners, audit committees, audit quality and firm size influence simultaneously to tax avoidance. Partially, the proportion of independent board of commissioner and audit committee influence tax avoidance. While institutional ownership, audit quality, and firm size have no significant effect on tax avoidance.

Keywords: Institutional Ownership, Audit Committee, Audit Quality, Proportion of Independent Board of Commissioners, Firm Size.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum. Untuk membangun sarana-sarana tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar dan pajak menyumbang besar atas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah semakin gencar melakukan upaya-upaya agar penerimaan pajak dapat meningkat. Pada praktiknya, terdapat hambatan yang dihadapi pemerintah dalam pemungutan pajak. Salah satunya adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak. Pemerintah menginginkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tinggi sehingga pembangunan dapat dilakukan. Namun wajib pajak menginginkan sebaliknya, wajib pajak menginginkan jumlah pajak yang dibayarkan rendah karena pajak merupakan beban yang harus dibayarkan dan dapat mengurangi *profit*. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak adalah *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana teknik dan metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan (Pohan, 2014).

Corporate governance menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik akan berupaya untuk tetap patuh kepada peraturan perundang-undangan khususnya perpajakan agar tetap dapat menjaga nama baik perusahaan yang telah dibangun. Tujuan *corporate governance* adalah untuk memberikan nilai tambah kepada seluruh pihak. Selain itu, ukuran perusahaan juga menentukan juga dapat mempengaruhi pengelolaan pajak. Semakin besar aset perusahaan maka akan semakin besar ukuran perusahaan (Pohan, 2014). Pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan kecil tidak dapat dilakukan secara optimal seperti yang dilakukan oleh perusahaan besar. Hal ini terjadi karena perusahaan besar memiliki sumber daya atau tenaga ahli dalam bidang perpajakan sehingga dapat dilakukannya manajemen perpajakan untuk menguntungkan perusahaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) untuk mengetahui kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan dan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Indeks SRI KEHATI periode 2013-2015, 2) untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* secara simultan, 3) untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* secara parsial.

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1. Tinjauan Pustaka Penelitian

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2. Tax Avoidance

Menurut Pohan (2014) *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana teknik dan metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan.

Dalam penelitian ini *Book Tax Different* (BTD) digunakan sebagai proksi *tax avoidance*. BTD merupakan perbedaan antara dua pengukuran dimana salah satu ukutan ditentukan oleh peraturan pelaporan keuangan untuk memberikan laba akuntansi, sedangkan yang kedua menggunakan hukum pajak untuk menghasilkan laba kena pajak (Wahab dan Holland, 2015).

$$BTD = \frac{(EBIT - \text{Penghasilan Kena Pajak})}{\text{Total Aset Tahun Sebelumnya}}$$

2.1.3. Corporate Governance

2.1.3.1 Teori Keagenan

Home dan Wachowicz (2012) mendefinisikan sebuah teori agensi sebagai cabang dari ekonomi yang berhubungan dengan perilaku pada *principals* (pemilik) dan agen mereka (manajer perusahaan). Sutedi (2011) menyebutkan bahwa *theory agency* menekankan pentingnya perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari.

2.1.3.2 Corporate Governance

Menurut Sutedi (2011), Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

2.1.3.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi lain seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan dan institusi lainnya (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Total Saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.1.3.4 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan. Dengan adanya anggota yang bersifat independen diharapkan pengawasan dapat dilakukan secara optimal karena terhindar dari pengaruh kepentingan pihak lainnya.

$$\text{Proporsi Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

2.1.3.5 Komite Audit

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/PJOK.04/2015 menjelaskan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Struktur komite audit berdasarkan pasal 4 yaitu mempunyai anggota paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit berperan sebagai jembatan antara auditor eksternal dengan auditor internal, sehingga komite audit harus bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, baik dari dewan direksi maupun dengan auditor eksternal dan internal dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan memiliki komite audit berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih maka akan diberi kode 1, sedangkan jika perusahaan memiliki komite audit kurang dari 3 (tiga) orang maka akan diberi kode 0.

2.1.3.6 Kualitas Audit

Transparansi merupakan salah satu elemen penting dalam corporate governance. Menurut Sartori (2010), transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham, alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya. Dimensi kualitas auditor yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah ukuran kantor akuntan publik atau KAP karena nama baik perusahaan (KAP) dianggap merupakan gambaran yang paling penting. KAP *Big Four* dianggap lebih berkualitas karena dengan serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit yang dianggap lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan KAP *non Big Four* Guna dan Herawaty (2010). Pengukuran yang digunakan adalah variabel *dummy*. Bernilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP *Bigfour*, dan bernilai 0 jika KAP diaudit oleh KAP *Non Bigfour*. Kategori KAP *Big Four* di Indonesia adalah sebagai berikut: a) KAP Price Waterhouse Coopers, b) KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), c) KAP Ernest and Young, d) KAP Deloitte Touche Thomatsu

2.1.3.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dalam Ratnawati (2012) merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil suatu perusahaan. Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Dalam mengukur ukuran perusahaan, penelitian ini menggunakan total aset. Pengukuran total aset pada penelitian ini juga memakai logaritma natural (ln).

$$\text{Total Aset} = \ln \times \text{Total Aset}$$

2.3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks SRI KEHATI periode 2013-2015. Selain itu, dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling* Setelah mengeliminasi semua perusahaan sektor perbankan maka didapatkanlah 20 perusahaan yang memenuhi kriteria.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta_1 X_{1,i,t} + \beta_2 X_{2,i,t} + \beta_3 X_{3,i,t} + \beta_4 X_{4,i,t} + \beta_5 X_{5,i,t} + \varepsilon$$

Keterangan:

$Y_{i,t}$ = Tax Avoidance

α = Konstanta

X_1 = Kepemilikan Institusional

X_2 = Proporsi Dewan Komisaris Independen

X_3 = Komite Audit

X_4 = Kualitas Audit

X_5 = Ukuran Perusahaan

β_1, \dots, β_5 = Koefisien regresi masing – masing variabel

ε = Standar error

3. Pembahasan

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil pengujian statistik deskriptif dari variabel ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan *enterprise risk management*.

Tabel 1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	BTD	KI	DK	KA	KuA	UP
Mean	0.21	62.43	0.445	0.983	0.847	31.593
Min	(0.02)	47.15	0.286	0.000	0.000	28.597
Max	10.09	90.01	0.800	1.000	1.000	34.445
Stdev	1.298	11.919	0.122	0.130	0.363	1.719
Observations	60	60	60	60	60	60

Sumber: *Output Excel 2016*, data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa hanya variabel tax avoidance yang memiliki nilai rata-rata (mean) yang lebih kecil dari nilai standar deviasi (std. dev.) yang berarti data tersebut menyebar dan bervariasi. Sementara itu, variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti data tersebut tidak menyebar dan tidak bervariasi.

3.2. Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pengujian dua model yang telah dilakukan (uji chow dan uji hausman), maka model *random effect* merupakan model yang sesuai untuk penelitian ini.

Tabel 2 Hasil Uji *Random Effect*

Dependent Variable: BTD
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 10/19/17 Time: 17:01
 Sample: 2013 2015
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 20
 Total panel (balanced) observations: 60
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.236098	0.221486	1.065974	0.2915
KI	-0.000320	0.092948	-0.003445	0.9973
DK	-0.164354	0.065655	-2.503298	0.0155
KA	-0.077578	0.028086	-2.762134	0.0080
KUA	-0.003733	0.021305	-0.175196	0.8616
UP	-0.001223	0.006931	-0.176471	0.8606

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.049445	0.7435
Idiosyncratic random		0.029039	0.2565

Weighted Statistics			
R-squared	0.417987	Mean dependent var	0.014259
Adjusted R-squared	0.360927	S.D. dependent var	0.036362
S.E. of regression	0.029068	Sum squared resid	0.043093
F-statistic	7.325377	Durbin-Watson stat	1.675853
Prob(F-statistic)	0.000031		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.390930	Mean dependent var	0.044404
Sum squared resid	0.160830	Durbin-Watson stat	0.449030

Sumber: Output EViews 9 (2017), data diolah 2017

Berdasarkan tabel 2, Penulis merumuskan persamaan model regresi data panel yang menjelaskan pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, yaitu:

$$Y = 0.236098 - 0.000320X_1 - 0.164354X_2 - 0.077578X_3 - 0.003733X_4 - 0.001223X_5 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = *Tax Avoidance* (BTD)
 X = Kepemilikan Institusional
 X₂ = Proporsi Dewan Komisaris Independen
 X₃ = Komite Audit
 X₄ = Kualitas Audit
 X₅ = Ukuran Perusahaan
 e = *Error Term*

3.2.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis Koefisien Determinasi (R^2) secara garis besar mengukur seberapa jauh kemampuan suatu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dari uji metode random effect model yang tersaji pada tabel 4.11, diperoleh nilai Adjusted R-Squared sebesar 0.360927 atau 36.09%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen yang terdiri dari kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan variabel dependen yaitu tax avoidance sebesar 0.360927 atau 36.09% sedangkan sisanya sebesar 0.639073 atau 63.90% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

3.2.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen (Ghozali, 2013). Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi sebesar 0.05 atau 5%. Jika taraf signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0.05 maka H_0 diterima atau secara simultan variabel dependen tidak berpengaruh terhadap variabel independen. Sebaliknya, jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak atau variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama atau berpengaruh secara simultan.

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai Prob (F-static) adalah sebesar 0.000031 atau lebih kecil dari 0.05, maka H_0 ditolak, berarti bahwa variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati Periode 2013-2015.

3.2.3. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Pada dasarnya uji statistik T menunjukkan seberapa pengaruh variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan pengujian parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan dan konsentrasi kepemilikan terhadap *enterprise risk managemet* sebagai variabel dependen. Berdasarkan hasil uji T pada tabel 2 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Kepemilikan Institusional (X_1) memiliki nilai probabilitas (p-value) 0.9973 > tingkat signifikansi 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah menerima H_{01} atau menolak H_{a1} yang berarti bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati 2013-2015 secara parsial.
2. Variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen (X_2) memiliki nilai probabilitas (p-value) 0.0155 < tingkat signifikansi 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah menolak H_{02} atau menerima H_{a2} yang berarti bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015 secara parsial.
3. Variabel Komite Audit (X_3) memiliki nilai probabilitas (p-value) 0.0080 < tingkat signifikansi 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah menolak H_{03} atau menerima H_{a3} yang berarti bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015 secara parsial.
4. Variabel Kualitas Audit (X_4) memiliki nilai probabilitas (p-value) 0.8616 > tingkat signifikansi 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah menerima H_{04} atau menolak H_{a4} yang berarti bahwa kualitas audit yang diproyeksikan dengan ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015 secara parsial.
5. Variabel Ukuran Perusahaan (X_5) memiliki nilai probabilitas (p-value) 0.8606 > tingkat signifikansi 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah menerima H_{04} atau menolak H_{a4} yang berarti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015 secara parsial.

4. Kesimpulan

Pada penelitian ini variabel terikat atau dependen yang digunakan adalah tax avoidance dan variabel bebas atau independen yang digunakan adalah kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 perusahaan dengan total 60 observasi. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan pengujian regresi data panel, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis statistik deskriptif, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Tax Avoidance yang diprosikan dengan Book Tax Different yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015 memiliki nilai rata-rata 0.21 yang lebih kecil dibandingkan standar deviasi yaitu 1.298. Sebanyak 6 observasi

atau 10% dari total observasi perusahaan cenderung melakukan tax avoidance karena memiliki nilai rata-rata dibawah rata-rata keseluruhan. Sedangkan 90% sisanya memiliki nilai rata-rata diatas rata-rata keseluruhan yang menunjukkan bahwa perusahaan pada sampel ini cenderung tidak melakukan tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015 sebanyak 90% tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Nilai minimal variabel tax avoidance adalah sebesar (0.02) yaitu Gajah Tunggal Tbk pada tahun 2015. Nilai maksimal variabel tax avoidance adalah sebesar 10.09 yaitu Pembangunan Jaya Ancol Tbk pada tahun 2013.

b. Kepemilikan institusional pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015 memiliki nilai rata-rata 62.43 yang lebih besar dari standar deviasi yaitu 11.919. Sebanyak 21 observasi dari total 60 observasi memiliki angka diatas rata-rata, sedangkan sebanyak 39 observasi atau 65% sisanya dibawah rata-rata. Nilai minimal variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 47.15 oleh Bank Central Asia Tbk. Nilai maksimal variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 90.01 oleh Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

c. Proporsi Dewan Komisaris Independen pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015 memiliki nilai rata-rata 0.445 lebih besar dari standar deviasi yaitu 0.122. Terdapat 23 observasi dari total 60 observasi atau 38.3% yang memiliki nilai diatas rata-rata keseluruhan. Sedangkan 61.7% sisanya atau 37 observasi dari total 60 observasi memiliki nilai dibawah rata-rata. Nilai minimal variabel proporsi dewan komisaris independen adalah sebesar 0.286 oleh Semen Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2015. Nilai maksimal variabel proporsi dewan komisaris independen adalah sebesar 0.800 oleh Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2013-2015.

d. Komite audit pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015 memiliki nilai rata-rata 0.983 lebih besar dari standar deviasi yaitu 0.130. Pengukuran komite audit adalah dengan menggunakan variabel dummy. Terdapat 59 observasi dari total 60 observasi atau 98.33% perusahaan sampel yang memiliki nilai dummy 1 (memiliki komite audit ≥ 3 orang) dan 1 observasi dari total 60 observasi atau 1.667% perusahaan sampel yang memiliki nilai dummy 0 yaitu Adhi Karya Persero Tbk.

e. Kualitas audit pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015 memiliki nilai rata-rata 0.847 lebih besar dari standar deviasi yaitu 0.363. Pengukuran kualitas audit adalah dengan menggunakan variabel dummy. Terdapat 51 observasi dari total 60 observasi atau 85% perusahaan sampel yang memiliki nilai dummy 1 (diaudit oleh KAP Bigfour) dan 9 observasi atau 14% perusahaan sampel yang memiliki nilai dummy 0 (diaudit oleh KAP non Bigfour).

f. Ukuran perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015 memiliki nilai rata-rata 31.593 lebih besar dari standar deviasi yaitu 1.719. Pengukuran ukuran perusahaan menggunakan total aset. Terdapat 27 observasi dari total 60 observasi atau 65% perusahaan sampel yang memiliki nilai diatas rata-rata. Sedangkan 55% sisanya atau 33 observasi memiliki nilai dibawah rata-rata. Nilai minimum variabel ukuran perusahaan adalah 28.597 oleh Pembangunan Jaya Ancol Tbk pada tahun 2013. Nilai maksimum variabel ukuran perusahaan adalah 34.445 oleh Bank Mandiri pada tahun 2015.

2. Pengujian secara simultan:

Secara simultan atau bersama-sama, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015.

3. Pengujian secara parsial yaitu:

a. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidacne pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015.

b. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidacne pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015.

c. Komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidacne pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015.

d. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidacne pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015.

e. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidacne pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015.

5. Saran

5.1 Aspek teroritis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran untuk pengembangan bagi penelitian selanjutnya, yaitu:

a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan dan menguji beberapa variabel lain yang masih berkaitan dan diduga memiliki pengaruh terhadap tax avoidance seperti kepemilikan manajerial atau menggunakan rasio lain dalam laporan keuangan seperti Return On Asset, dan variabel lainnya.

b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan sampel yang berbeda selain perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati periode 2013-2015.

5.2 Aspek Praktis

a. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mempertimbangkan proporsi kepemilikan institusional dan jumlah komite audit dalam perusahaan tersebut. Karena bentuk pengawasan dari proporsi dewan komisaris independen dan komite audit menjadi salah satu faktor dalam praktik tax avoidance.

b. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan berinvestasi, investor dapat memperhatikan jumlah dewan komisaris dan komite audit dalam perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati Periode 2013-2015.

Daftar Pustaka:

- [1] Ngadiman, dan Christiany Puspitasari. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Akuntansi Volume XVIII No. 3 September 2014*, 408-421.
- [2] Sutedi, Adrian. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- [4] Wahab, Nor Shaipah Abdul dan Kevin Holland. (2015). The Persistence of Book-Tax Differences. *The British Accounting Review 47 (2015)*, 339-350.
- [5] Horne, James C. Van dan John M Wachowicz, Jr. (2012). *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (Edisi 13)*. Jakarta: Salemba Empat.
- [6] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- [7] Pohan, Chairil Anwar. (2014). *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [8] Ratnawati, Andalan Tri. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee) Studi Empiris Pada Perusahaan Non Perbankan Yang Listing di BEI. *Media Ekonomi Dan Manajemen: Vol 26, No 2*.
- [8] Sartori, Nicola. (2008). *Effects of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance*.
- [9] Guna, Welvin I., dan Herawaty, Arleen. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi STIE Trisakti*. Vol 12(1).